

MODULAR PARTIES PADA CALON LEGISLATIF DI KABUPATEN BADUNG STUDI KASUS : I MADE SURYANANDA PRAMANA

I Gusti Ayu Yoyik Anna Midori ¹⁾

I Ketut Putra Erawan ²⁾

Kadek Dwita Apriani ³⁾

Universitas Udayana ¹⁾

email: yoyikannamidori31@gmail.com

Universitas Udayana ²⁾

email: ketut.erawan@ipd.or.id

Universitas Udayana ³⁾

email: kadek.dwita88@unud.ac.id

Article Info

ABSTRACT

Article History:

Received:

December/2025

Accepted:

December/2025

Published:

December/2025

Keywords:

Modular Parties, Patron
Client Relations, Local
Democracy, Electoral
Strategy, DPRD Badung

This study analyzes the strategic shift from *patron client relations* to *modular parties* in the election of I Made Suryananda Pramana to the Badung Regency DPRD in 2019 and 2024. Using a qualitative case study approach, the research reveals that the candidate leveraged local actors such as customary leaders and banjar structures as semi autonomous political brokers to efficiently mobilize votes. Although the total vote count decreased in 2024, this strategy successfully consolidated the core support base through material incentives facilitated by party elites. The study concludes that this electoral success resulted from integrating elite political capital with modular strategies responsive to the local Balinese socio cultural context.

PENDAHULUAN

Dinamika politik elektoral di Indonesia saat ini tidak lagi sekadar pertarungan ideologi, melainkan telah bergeser ke arah mobilisasi pragmatis yang membutuhkan biaya politik tinggi dan jaringan yang fleksibel. Fenomena ini terlihat jelas di Kabupaten Badung, Bali, di mana kompetisi antar calon legislatif (caleg) memaksa mereka mengamankan kekuasaan melalui instrumen klientelisme dan patronase. Strategi kemenangan kini sangat bergantung pada kemampuan personal kandidat dalam mengelola jaringan kemenangan yang cepat dan terukur secara elektoral. Fakta menarik muncul dalam studi kasus keterpilihan I Made

Suryananda Pramana di Dapil Kuta Utara. Sebagai pendatang baru pada Pemilu 2019, ia berhasil meraih 5.407 suara, namun pada Pemilu 2024 saat menyandang status petahana, jumlah suaranya justru mengalami penurunan menjadi 4.370 suara (berkurang 1.037 suara). Meskipun terjadi penurunan kuantitas secara total, Suryananda tetap berhasil mengamankan kursi DPRD Kabupaten Badung melalui konsolidasi basis dukungan yang lebih terfokus di wilayah inti.

Data menunjukkan penurunan suara paling signifikan terjadi di Desa Dalung (berkurang 220 suara) dan Desa Cangu (berkurang 260 suara). Namun, secara proporsional, dukungan di wilayah basis seperti Kerobokan Kelod dan Kerobokan tetap terjaga berkat efektivitas kerja jaringan tim pemenangan. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran strategi dari pendekatan personalistik pada 2019 yang mengandalkan figur ayah (mantan Wakil Bupati I Made Sudiana) dan elit partai (Bupati I Nyoman Giri Prasta), menuju penggunaan "modul-modul" politik yang lebih terorganisir pada 2024.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada fakta bahwa meskipun hubungan *patron-client* tradisional masih kuat di Bali, terdapat mekanisme baru yang lebih fleksibel melalui tim sukses GURARI (Regu Gerak Pemilih). Tim ini bertindak sebagai "modul" semi-otonom yang memanfaatkan struktur lokal seperti *banjar*, kelompok pemuda (STT), dan klan (*soroh*) untuk memobilisasi suara secara transaksional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana kerangka *modular parties* yang diperkenalkan oleh (Novaes, 2015) mampu menjelaskan keberhasilan seorang kandidat dalam mempertahankan kursi di tengah fluktuasi suara dan ketatnya kompetisi politik lokal di Badung.

Fenomena ini terlihat sangat mencolok dalam konteks politik lokal di Kabupaten Badung, Bali. Penelitian ini secara spesifik mengkaji pergeseran strategi pemenangan I Made Suryananda Pramana sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kuta Utara pada dua periode pemilihan berturut-turut, yaitu Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Sebagai seorang aktor politik yang mengawali karirnya sebagai pendatang baru (*newcomer*) pada tahun 2019 dan bertransformasi menjadi petahana (*incumbent*) pada 2024, Suryananda menghadapi tantangan elektoral yang berbeda pada setiap periodenya. Pada tahun 2019, strategi yang digunakan cenderung berorientasi pada pendekatan personalistik, mengandalkan kedekatan dengan tokoh adat dan pemuda.

Data lapangan yang dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap beberapa tokoh kunci berkaitan dan observasi selama masa kampanye menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, terjadi transformasi signifikan dalam mekanisme penggalangan dukungan. Temuan penelitian mengungkap bahwa dukungan pemilih bagi I Made Suryananda Pramana tidak lagi semata-mata ditopang oleh relasi personalistik antara kandidat dan tokoh tertentu, melainkan telah bergeser ke arah struktur kelompok yang lebih sistematis. Fakta ini terkonfirmasi dengan terbentuknya unit pemenangan GURARI (Regu Gerak Pemilih), sebuah tim sukses yang bertindak sebagai broker politik terorganisir

untuk mengelola unit-unit sosial di tingkat basis. Pergeseran ini menandai transisi dari pola patronase tradisional menuju mekanisme kerja yang lebih profesional dan terukur secara elektoral.

Kajian literatur mengenai mobilisasi pemilih di Indonesia, sebagaimana didokumentasikan oleh para ahli seperti (Aspinall, 2014) dan (Biermann, 2024), sebagian besar masih berpusat pada konsep tradisional klientelisme dan patronase. Studi-studi terdahulu secara solid menunjukkan bahwa hubungan *patron-client* di mana elit menukarkan sumber daya material atau simbolik dengan dukungan suara adalah mekanisme sentral dalam politik Indonesia. Hubungan ini ditandai oleh asimetri kekuasaan, kewajiban yang tidak tertulis, dan durabilitas hubungan. Namun, kerangka teori klasik ini terkadang kurang memadai untuk menjelaskan fenomena di mana partai atau kandidat mampu memobilisasi suara secara efektif tanpa membangun ikatan emosional jangka panjang yang mendalam dengan pemilih.

Untuk menjembatani keterbatasan tersebut, (Novaes, 2015) memperkenalkan kerangka teoretis *Modular Parties*. Konsep ini menjelaskan bagaimana partai politik atau politisi yang menghadapi tantangan dalam membangun mesin partai permanen, memilih untuk menggunakan jaringan atau "modul" lepas-pasang (*ad-hoc*) yang bersifat semi-otonom dan fleksibel dalam kampanye elektoral. Dalam konsep *modular parties*, struktur organisasi terdiri dari dua tingkatan: tingkat atas sebagai pengakses sumber daya negara, dan tingkat bawah sebagai modul yang berisi broker atau agen lokal yang memiliki jaringan pemilih sendiri. Modul-modul ini yang di Bali dapat berupa struktur *banjar*, kelompok *soroh* (klan), organisasi pemuda (STT), atau tim sukses spesifik seperti GURARI (Regu Gerak Pemilih) bekerja secara transaksional untuk mengantarkan suara kepada kandidat yang mampu memberikan insentif material atau akses kekuasaan, namun mereka tidak sepenuhnya terikat pada loyalitas ideologis partai.

Meskipun teori ini relevan, terdapat kesenjangan teoretis (*gap analysis*) yang signifikan dalam literatur politik Indonesia. Sebagian besar penelitian yang ada masih terkunci pada narasi *patron-client* tradisional yang bersifat vertikal, dan sedikit yang secara empiris mengaplikasikan kerangka *modular parties* untuk menganalisis evolusi strategi seorang kandidat petahana di tingkat lokal. Kesenjangan ini semakin menarik ketika diletakkan dalam konteks sosial budaya Bali yang unik, di mana struktur adat dan budaya gotong royong sering kali menjadi basis legitimasi bagi praktik pertukaran politik tersebut. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana struktur sosial tradisional Bali yang komunal dapat bertransformasi menjadi "modul-modul" politik modern yang efektif dalam mendulang suara.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan analisis pada transformasi strategi I Made Suryananda Pramana. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti bagaimana ia beralih dari sekadar mengandalkan modal sosial dan *endorsement* patron elit seperti Bupati I Nyoman Giri Prasta pada 2019,

menjadi pembentukan jaringan terstruktur dan otonom pada 2024. *Novelty* atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada deskripsi empiris mengenai mekanisme fungsional modul-modul pemenangan tersebut, yang berhasil mengadaptasi struktur sosial lokal (seperti *banjar* dan *kawitan*) sebagai unit otonom dalam sistem *modular parties* demi efisiensi mobilisasi suara di tengah kompetisi yang ketat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana konsep *modular parties* relevan dan efektif dalam menjelaskan kemenangan elektoral di politik lokal Badung, serta bagaimana hubungan patronase beradaptasi menjadi bentuk yang lebih modular. Secara implisit, hipotesis yang diajukan dalam studi ini adalah bahwa keberhasilan Suryananda mempertahankan kursinya pada Pemilu 2024 bukanlah hasil kerja mesin partai yang birokratis, melainkan hasil dari hibridisasi strategi: yaitu penguatan relasi *patron-client* vertikal dengan elit partai yang menyediakan sumber daya, yang kemudian dieksekusi secara horizontal melalui jaringan lapangan berbasis *modular parties* yang adaptif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*), sebuah pendekatan yang dipilih secara sadar untuk menangkap realitas sosial yang kompleks dan holistik dalam konteks politik lokal di Kabupaten Badung, Bali. Pemilihan desain kualitatif didasarkan pada asumsi filosofis bahwa fenomena pergeseran strategi mobilisasi suara dari relasi *patron-client* tradisional menuju praktik *modular parties* tidak dapat diukur secara statistik, melainkan harus dipahami melalui interpretasi mendalam terhadap makna, motivasi, dan mekanisme yang diungkapkan oleh aktor-aktor politik itu sendiri. Studi kasus ini berfokus pada unit analisis tunggal, yaitu evolusi strategi pemenangan I Made Suryananda Pramana, memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana kerangka *modular parties* (Novaes, 2015) termanifestasi dalam lingkungan sosial-budaya Bali yang sangat terikat pada sistem adat dan klan.

Lokasi utama studi difokuskan pada Daerah Pemilihan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, yang merupakan arena elektoral krusial bagi kandidat yang diteliti. Pemilihan Kuta Utara sebagai lokasi inti sangat relevan karena mencerminkan percampuran antara struktur adat Bali yang kental (*banjar* dan *kawitan*) dan modernisasi yang dibawa oleh pariwisata dan arus urbanisasi, menjadikannya laboratorium ideal untuk menguji hibridisasi strategi politik. Selain itu, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung dan Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Badung juga dijadikan lokasi pendukung untuk pengumpulan data sekunder dan verifikasi kelembagaan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling* yang menyasar individu-individu dengan keterlibatan langsung serta memiliki kredibilitas dalam proses politik elektoral di Daerah Pemilihan Kuta Utara. Guna menjamin validitas melalui mekanisme triangulasi sumber, informan

diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yang saling berkaitan. Tingkat pertama melibatkan aktor utama, yakni I Made Suryananda Pramana, yang memberikan perspektif mendalam mengenai pengambilan keputusan strategis dan visi politik. Tingkat kedua mencakup kelompok broker politik dan tim inti, termasuk Nengah Sudarsana, Dedek Wiryanatha, Oka Darmawan, Dwi Adhi Putra, serta perwakilan struktural dari DPC PDIP Kabupaten Badung seperti Arik dan Dewa Gede Ari yang berperan sebagai operasional penggerak di lapangan. Pada tingkat ketiga, peneliti melibatkan klien serta tokoh masyarakat lokal yang terdiri dari tokoh *banjar* dan warga penerima manfaat guna memperoleh bukti empiris atas efektivitas mobilisasi di tingkat akar rumput. Seluruh proses pengumpulan data dijalankan dengan kepatuhan terhadap standar etik penelitian melalui prosedur *informed consent*. Peneliti telah memberikan penjelasan transparan mengenai tujuan penelitian kepada para informan, di mana para informan kunci telah memberikan persetujuan eksplisit agar identitas mereka dicantumkan guna mendukung transparansi data. Sementara itu, untuk menjaga privasi informan pada kategori masyarakat atau klien, peneliti menerapkan kebijakan anonimitas dalam penyajian data pada bagian pembahasan..

Data dikumpulkan melalui triangulasi metode yang meliputi Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), Observasi, dan Dokumentasi. Wawancara mendalam menjadi instrumen utama untuk menggali narasi subjektif, motivasi pembentukan *Modul Pemenangan* (Tim GURARI), serta detail mekanisme pertukaran *patron-client* yang terjadi. Observasi dilakukan secara partisipatif terbatas dan non-partisipatif pada kegiatan sosialisasi, pertemuan *banjar*, dan proses penyerahan hibah, bertujuan untuk memvalidasi temuan wawancara melalui pengamatan langsung terhadap interaksi sosial politik. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif penunjang, seperti rekapitulasi perolehan suara resmi KPU Badung dari Pemilu 2019 dan 2024, dokumen program kerja partai, serta arsip media massa.

Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang bergerak secara siklus dan berkelanjutan. Proses dimulai dengan Kondensasi Data (*Data Condensation*) atau reduksi data, di mana catatan lapangan dan transkrip wawancara yang terakumulasi difokuskan, disederhanakan, dan ditransformasikan menjadi kategori-kategori tematik yang relevan dengan kerangka teoritis *modular parties* dan klientelisme. Selanjutnya, dilakukan Penyajian Data (*Data Display*) dalam bentuk teks naratif yang sistematis, diperkuat dengan bagan tematik dan tabel perbandingan perolehan suara untuk memvisualisasikan pergeseran dukungan geografis. Tahap akhir adalah Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, di mana temuan empiris diverifikasi secara induktif terhadap teori *modular parties* (Novaes, 2015). Verifikasi ini tidak hanya untuk menguji relevansi teori, tetapi juga untuk mengidentifikasi *gap analysis* teoretis dan menegaskan *novelty* penelitian, yakni deskripsi tentang bagaimana struktur adat Bali terkooptasi menjadi unit *modular parties* yang otonom dan efisien dalam konteks politik Badung. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber, membandingkan data yang berasal dari berbagai informan kunci, dan triangulasi

metode, yakni mencocokkan hasil wawancara dengan bukti dokumentasi fisik KPU dan observasi lapangan.

Rangkaian metodologi kualitatif yang ketat ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa studi kasus ini tidak hanya sekadar mendeskripsikan fenomena, tetapi mampu mencapai kedalaman analitis (*thick description*) yang menjadi prasyarat esensial dalam penelitian ilmu sosial. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengurai secara terperinci benang merah kausalitas yang kompleks antara modal politik yang dimiliki Suryananda, konteks sosial-budaya lokal yang unik (termasuk peran sentral Banjar dan sistem Adat Bali), dan praktik mobilisasi suara modular yang efisien. Proses analisis dan verifikasi yang berulang-ulang melalui triangulasi sumber dan metode berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang ketat, menjamin bahwa temuan lapangan benar-benar kredibel (*trustworthiness*) dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Selain itu, metodologi yang digunakan memiliki implikasi signifikan terhadap dimensi teoretis penelitian. Kesimpulan yang ditarik bersifat induktif, artinya berakar kuat dan terbentuk dari bukti-bukti empiris lapangan, bukan semata-mata deduksi dari teori yang sudah ada. Hal ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori *modular parties* (Novaes, 2015) di konteks Indonesia, tetapi juga untuk memperkaya dan memodifikasi teori tersebut dengan memasukkan variabel spesifik lokal, yaitu kooptasi struktur adat Banjar sebagai unit modular yang otonom. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi kemenangan di Kabupaten Badung, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ilmu politik dengan mengontekstualisasikan dan mengembangkan kerangka teori *modular parties* dalam arena politik sub-nasional di tengah kekuatan tradisi dan modernisasi. Kualitas dan kedalaman data yang telah teruji kredibilitasnya memastikan bahwa temuan-temuan ini relevan untuk digunakan sebagai landasan studi perbandingan di wilayah lain yang memiliki struktur sosial serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika politik elektoral di tingkat lokal, khususnya dalam studi kasus keterpilihan I Made Suryananda Pramana di DPRD Kabupaten Badung, menunjukkan adanya transformasi strategi yang signifikan antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Analisis terhadap perolehan suara menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan kuantitas suara total dari 5.407 suara pada tahun 2019 menjadi 4.370 suara pada tahun 2024, terjadi konsolidasi basis dukungan yang lebih terfokus pada wilayah inti. Penurunan suara paling signifikan tercatat di Desa Dalung dan Desa Cangu secara absolut, namun secara proporsional, dukungan di desa desa basis seperti Cangu, Kerobokan Kelod, dan Kerobokan tetap terjaga berkat efektivitas kerja jaringan tim kemenangan di tingkat lokal. Fenomena fluktuasi suara ini bukan sekadar refleksi dari popularitas individu, melainkan indikasi bekerjanya mesin politik yang adaptif, yang bergeser dari pendekatan patronase

tradisional yang personalistik menuju strategi *modular parties* yang lebih terstruktur dan efisien.

Perbandingan Perolehan Suara I Made Suryananda pada Pemilu Legislatif 2019 dan 2024 di Kecamatan Kuta Utara

Desa	Suara 2019	Suara 2024	Perubahan (2024 – 2019)
Canggu	1.450	1.190	-260 (1.450 – 1.190 = 260)
Kerobokan Kelod	1.210	1.030	-180 (1.210 – 1.030 = 180)
Kerobokan	950	840	-110 (950 – 840 = 110)
Tibubeneng	720	620	-100 (720 – 620 = 100)
Kerobokan Kaja	637	470	-167 (637 – 470 = 167)
Dalung	440	220	-220 (440 – 220 = 220)
Total (Suryananda)	5.407	4.370	-1.037

Sumber : KPU Kabupaten Badung

Strategi politik yang diterapkan I Made Suryananda memperlihatkan evolusi taktik mobilisasi suara. Pada Pemilu 2019, keterpilihannya sebagai pendatang baru sangat dipengaruhi oleh relasi patron klien yang bersifat vertikal dan personal. Modal politik utamanya bersumber dari dukungan elite partai, khususnya I Nyoman Giri Prasta selaku Ketua DPC PDIP sekaligus Bupati Badung, serta modal sosial ayahnya, I Made Suidana, yang merupakan mantan Wakil Bupati Badung. Dalam fase ini, pola hubungan patron klien terlihat jelas melalui dukungan simbolik dan material, seperti kehadiran Bupati dalam peresmian fasilitas publik dan masjid di Canggu yang didampingi oleh Suryananda, yang berfungsi sebagai *endorsement* politik untuk membangun legitimasi di mata konstituen. Strategi ini menempatkan Suryananda sebagai klien dari elite partai (patron) namun sekaligus bertindak sebagai patron bagi masyarakat melalui distribusi bantuan sosial dan hibah.

Namun, pada Pemilu 2024, strategi tersebut mengalami pergeseran fundamental menuju praktik *modular parties*. Sesuai dengan kerangka teori Lucas Novaes, partai atau kandidat tidak lagi membangun hubungan langsung dan ideologis jangka panjang dengan pemilih secara massal, melainkan mengandalkan "modul modul" perantara yang bersifat semi otonom. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Suryananda membentuk tim sukses berbasis modular yang dikenal dengan GURARI (Regu Gerak Pemilih). Tim ini tidak bekerja secara sentralistik kaku, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok kecil seperti tokoh adat, pemuda (STT), dan struktur banjar yang bergerak sesuai konteks wilayah masing-masing. Modul-modul ini berfungsi sebagai broker politik yang menjembatani kandidat dengan pemilih melalui jaringan sosial yang sudah ada, seperti ikatan kekerabatan (*soroh/kawitan*) dan solidaritas banjar. Hal ini

mengonfirmasi karakteristik *modular parties* di mana kandidat "memasang" (*plug in*) dirinya ke dalam jaringan sosial yang sudah mapan untuk memobilisasi suara secara instan tanpa perlu membangun infrastruktur partai yang permanen hingga ke akar rumput.

Efektivitas *modular parties* dalam kasus ini sangat bergantung pada peran broker politik yang mampu mengonversi sumber daya material menjadi dukungan elektoral. Nengah Sudarsana, selaku ketua tim kemenangan, memainkan peran sentral dalam mengelola modul modul lokal di kawasan Canggu dan Kerobokan Kelod. Melalui mekanisme ini, distribusi sumber daya berupa dana hibah untuk renovasi Pura Dadia, pengadaan gamelan gong, dan bantuan kegiatan PKK disalurkan secara tepat sasaran kepada kelompok kelompok strategis. Wawancara dengan penerima bantuan mengonfirmasi bahwa pertukaran ini menciptakan ikatan kewajiban timbal balik (*diffuse obligation*) yang kuat, di mana masyarakat merasa memiliki utang budi moral untuk mendukung Suryananda. Berbeda dengan patronase klasik yang kaku, hubungan dalam model modular ini lebih cair dan pragmatis; broker memiliki otonomi untuk menyesuaikan narasi kampanye sesuai kebutuhan lokal, sementara kandidat menyediakan akses terhadap sumber daya negara.

Pergeseran ke arah modularitas ini juga memiliki implikasi teoritis terhadap pemahaman klientelisme di tingkat lokal. Jika klientelisme tradisional mensyaratkan hubungan hierarkis yang ketat, praktik yang dijalankan Suryananda menunjukkan bentuk klientelisme baru yang lebih egaliter dan transaksional namun tetap dibalut norma budaya. Dukungan politik tidak lagi semata mata didasarkan pada loyalitas buta terhadap partai, melainkan hasil negosiasi kepentingan antara kandidat (penyedia akses), broker (perantara), dan pemilih (penerima manfaat). Fakta bahwa dukungan suara menurun di wilayah non prioritas seperti Dalung, yang tidak digarap secara intensif oleh modul tim kemenangan, memperkuat argumen bahwa strategi modular sangat bergantung pada keberadaan dan kinerja broker lokal. Tanpa "modul" yang bekerja di wilayah tersebut, mobilisasi suara menjadi tidak efektif, menegaskan bahwa partai politik (PDIP) dalam konteks ini berfungsi lebih sebagai kendaraan administratif dan penyedia legitimasi simbolik daripada mesin mobilisasi utama.

Keberhasilan konsolidasi suara I Made Suryananda Pramana pada Pemilu 2024 tidak lepas dari efektivitas kerja tim kemenangan yang terorganisir secara modular. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nengah Sudarsana selaku tim inti, terungkap bahwa terdapat transformasi strategi dari pola personalistik menuju penguatan unit-unit gerak yang lebih sistematis melalui Regu Gerak Pemilih (GURARI). Data ini kemudian ditriangulasi dengan keterangan dari pihak struktural DPC PDIP Kabupaten Badung, yakni Arik dan Dewa Gede Ari, yang mengonfirmasi bahwa dukungan partai diintegrasikan dengan jaringan relawan tingkat basis untuk memastikan lisensi politik partai berjalan selaras dengan gerakan personal kandidat. Validitas temuan ini semakin diperkuat oleh pengakuan sejumlah tokoh masyarakat di tingkat *banjar* yang menyatakan bahwa kehadiran

broker politik seperti Dedek Wiryanatha dan Oka Darmawan mempermudah akses komunikasi antara pemilih dengan kandidat melalui skema bantuan yang lebih terukur. Melalui sinkronisasi data dari aktor utama, perantara politik, hingga penerima manfaat di tingkat akar rumput ini, penelitian menunjukkan bahwa strategi *modula parties* yang diterapkan mampu menjaga loyalitas pemilih inti meskipun terjadi fluktuasi perolehan suara secara keseluruhan di wilayah Dapil Kuta Utara.

Secara keseluruhan, keterpilihan kembali I Made Suryananda pada 2024 membuktikan keberhasilan adaptasi strategi politik yang menggabungkan kekuatan patronase elite dengan fleksibilitas jaringan modular. Hubungan simbiosis mutualisme antara Suryananda dan Giri Prasta di mana Suryananda mendapatkan akses sumber daya dan Giri Prasta mendapatkan loyalitas politik untuk agenda yang lebih tinggi menjadi poros utama keberhasilan ini. Temuan ini memperkaya kajian tentang demokrasi lokal di Indonesia, menunjukkan bahwa di tengah melemahnya identifikasi ideologis partai (*party ID*), politisi lokal bertahan dengan cara memodularisasi jaringan klientelistik, memanfaatkan struktur adat dan komunitas sebagai infrastruktur pemenangan yang efektif, efisien, namun bersifat temporer. politisi lokal bertahan dengan cara memodularisasi jaringan klientelistik, memanfaatkan struktur adat dan komunitas sebagai infrastruktur pemenangan yang efektif, efisien, namun bersifat temporer.

Fenomena pergeseran strategi ini tidak hanya relevan untuk memahami kemenangan elektoral Suryananda, tetapi juga memiliki implikasi teoretis dan praktis yang lebih luas terhadap kajian demokrasi lokal di Indonesia. Secara teoretis, studi kasus ini menunjukkan bahwa kerangka *modular parties* Lucas Novaes (2015) tidak hanya berlaku dalam konteks partai politik di tingkat nasional, tetapi terbukti adaptif dan sangat *powerfull* ketika diterapkan pada level sub-nasional, khususnya di daerah yang memiliki modal sosial yang kuat seperti Bali. Keberhasilan Suryananda memvalidasi tesis bahwa ketika biaya politik meningkat dan persaingan semakin ketat, para kandidat akan beralih dari membangun mesin partai yang mahal menjadi mengontrak (*contracting out*) fungsi mobilisasi suara kepada broker atau modul lokal yang sudah teruji efektif.

Implikasi praktisnya terhadap demokrasi lokal Kabupaten Badung adalah terciptanya politik berbasis *trade-off* yang sangat jelas. Di satu sisi, sistem modular ini mendorong kandidat untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik komunitas (misalnya, perbaikan pura, bantuan STT), sehingga meningkatkan akuntabilitas fungsional. Modul-modul lokal berfungsi sebagai katup aspirasi yang memastikan sumber daya dari elite politik (Patron Tingkat Atas) tersalurkan langsung ke basis penerima manfaat (Klien Tingkat Bawah). Namun, di sisi lain, praktik ini secara fundamental mereduksi kontestasi politik menjadi sebuah persaingan transaksi insentif, di mana loyalitas ideologis dan program jangka panjang partai menjadi terdegradasi. Kepercayaan pemilih tidak lagi dilekatkan pada integritas partai, melainkan pada kemampuan Caleg sebagai *broker* yang efektif dalam mendatangkan keuntungan material bagi komunitas mereka.

Selanjutnya, adaptasi strategi modular Suryananda menunjukkan kecanggihan politik lokal dalam mengkooptasi kekuatan tradisional. Dengan memasukkan Banjar dan Tokoh Adat ke dalam jaringan modular, Suryananda tidak hanya mendapatkan dukungan suara, tetapi juga legitimasi kultural atas tindakan politiknya. Ketika bantuan material disalurkan melalui mekanisme adat, hal itu seolah-olah menghilangkan stigma klientelisme yang bersifat negatif, menjadikannya tampak sebagai wujud dari *ngayah* (pengabdian) atau bentuk tanggung jawab sosial-adat. Keterikatan sosial yang dibangun dalam struktur Banjar secara efektif mengurangi risiko pembelotan pemilih (*voter defection*), karena tekanan sosial (*social coercion*) dari modul adat lebih kuat daripada sanksi politik dari partai.

Oleh karena itu, kesuksesan Suryananda mempertahankan kursinya adalah studi kasus yang ideal untuk mengamati hibridisasi strategi elektoral di Indonesia; sebuah sintesis di mana koneksi politik tingkat tinggi (patronase elite partai) bertemu dengan mekanisme mobilisasi tingkat rendah (modularitas broker) yang berjalan di atas fondasi sosio-kultural lokal yang unik. Meskipun strategi ini efisien, kelangsungan dukungannya sangat bergantung pada keberlanjutan aliran sumber daya dari Patron Tingkat Atas. Jika koneksi patronase ini terputus, jaringan modular akan kehilangan insentif utamanya dan strategi ini akan menjadi tidak berkelanjutan, menunjukkan bahwa kekuatan modularitas sejatinya adalah rapuh tanpa sokongan kapital politik struktural yang memadai.

Lebih jauh, keberhasilan implementasi *modular parties* dalam kasus Suryananda tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-kultural masyarakat Bali yang komunal. Struktur *banjar* dan *dadia* (klan/kawitan) pada dasarnya adalah "modul sosial" yang sudah terbentuk secara organik. Suryananda tidak perlu membangun organisasi baru dari nol; ia hanya perlu melakukan "penyambungan" (*plug-in*) kepentingan politiknya ke dalam struktur sosial tersebut melalui perantara broker lokal. Ketika broker lokal seperti Nengah Sudarsana atau tokoh adat berhasil diyakinkan melalui insentif material berupa dana hibah atau bantuan pembangunan pura, maka seluruh gerbong komunitas dalam modul tersebut cenderung bergerak satu arah mengikuti arahan tokohnya. Hal ini menjelaskan mengapa dukungan suara Suryananda sangat tinggi di basis-basis di mana modul broker bekerja aktif (seperti Cangu dan Kerobokan Kelod), namun merosot tajam di wilayah seperti Dalung di mana koneksi modular tersebut tidak dirawat secara intensif.

Fenomena ini juga menyoroti adanya pergeseran fungsi partai politik di tingkat lokal. Dalam kerangka *modular parties*, PDIP sebagai institusi partai tidak lagi menjadi mesin utama yang memobilisasi pemilih secara ideologis. Sebaliknya, partai bertindak sebagai penyedia "lisensi" dan akses terhadap sumber daya negara (melalui Bupati Giri Prasta), sementara kerja elektoral riil diserahkan sepenuhnya kepada jaringan-jaringan modular yang semi-otonom tersebut. Implikasi dari strategi ini adalah terciptanya loyalitas yang bersifat pragmatis; dukungan pemilih

tidak diberikan kepada partai atau ideologi, melainkan kepada figur Suryananda dan keuntungan langsung yang diterima oleh komunitas mereka.

Pada akhirnya, strategi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Badung berjalan di atas logika pertukaran (transaksional). Meskipun strategi *modular parties* terbukti efisien untuk mempertahankan kursi kekuasaan di tengah kompetisi yang ketat, model ini menyisakan kerentanan. Ketergantungan yang tinggi pada distribusi bantuan sosial dan peran sentral broker politik membuat basis dukungan menjadi rapuh apabila aliran sumber daya terhenti. Penurunan total suara Suryananda pada 2024 menjadi sinyal bahwa meskipun basis inti terkonsolidasi, absennya perawatan jaringan di modul-modul non-prioritas dapat menggerus elektabilitas secara signifikan.

SIMPULAN

Analisis mendalam terhadap fenomena keterpilihan I Made Suryananda Pramana sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung pada Pemilu 2019 dan 2024 mengungkapkan sebuah pergeseran fundamental dalam lanskap politik lokal, di mana kemenangan elektoral tidak lagi semata-mata ditentukan oleh mesin partai yang bekerja secara ideologis atau kampanye konvensional. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan kursi legislatif di tengah kompetisi yang semakin ketat merupakan hasil dari integrasi taktis antara relasi patron-klien yang bersifat vertikal dengan penerapan strategi *modular parties* yang bekerja secara horizontal. Suryananda berhasil mentransformasi modal politik yang dimilikinya baik yang bersumber dari warisan reputasi figur keluarga, yaitu I Made Sudiana, maupun dukungan struktural dari elite partai tingkat atas seperti Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menjadi sebuah instrumen mobilisasi suara yang sangat efektif di tingkat akar rumput. Modal politik elite ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol restu kekuasaan, tetapi secara praktis mengalirkan sumber daya vital yang dibutuhkan untuk meminyaki mesin-mesin kemenangan di tingkat lokal.

Lebih jauh, durabilitas kekuasaan Suryananda terbukti sangat bergantung pada implementasi konsep *modula rparties* yang cerdas dan adaptif. Alih-alih berupaya membangun basis loyalitas massa yang kaku dan berjangka panjang melalui indoktrinasi partai, strategi kemenangan justru difokuskan pada pemanfaatan "modul-modul" sosial yang telah eksis secara organik di dalam struktur masyarakat Bali, seperti tokoh adat, kelompok pemuda (Sekaa Teruna Teruni), organisasi PKK, hingga struktur banjar dan dadia. Dalam mekanisme ini, jaringan broker politik lokal yang tergabung dalam tim taktis seperti GURARI bekerja dengan fleksibilitas tinggi dan sangat kontekstual. Mereka menyesuaikan narasi kampanye dan distribusi insentif dengan kebutuhan spesifik di tingkat mikro, sehingga mampu mengonversi bantuan material seperti dana hibah restorasi pura, pengadaan gong, atau perbaikan fasilitas banjar menjadi dukungan elektoral yang konkret dan solid.

Fenomena ini juga menandai terjadinya transformasi signifikan dalam praktik klientelisme di Kabupaten Badung, khususnya di daerah pemilihan Kuta Utara. Pola hubungan antara Suryananda sebagai patron dan konstituennya sebagai klien tidak lagi mencerminkan model feodal atau hierarkis tradisional yang kaku, melainkan telah berevolusi menjadi bentuk klientelisme baru yang lebih pragmatis, responsif, dan bernuansa demokratis. Dalam ekosistem politik baru ini, pemilih memiliki agensi yang lebih besar untuk mengevaluasi dan menuntut manfaat nyata dari kandidat. Akibatnya, tercipta sebuah kontrak politik dinamis di mana kandidat dituntut untuk hadir secara konsisten dan merespons aspirasi spiritual maupun sosial masyarakat, tidak hanya saat masa kampanye, tetapi juga selama masa jabatan, guna memelihara ikatan kewajiban timbal balik (*diffuse obligation*) yang menjadi perekat loyalitas pemilih.

Bukti empiris dari efektivitas strategi ini terlihat jelas pada hasil Pemilu 2024. Meskipun secara agregat terjadi fluktuasi penurunan total suara dibandingkan tahun 2019, strategi modular terbukti berhasil melakukan konsolidasi mutlak pada basis dukungan inti di wilayah prioritas seperti Desa Cangu dan Kerobokan Kelod. Hal ini memberikan konfirmasi teoretis bahwa efektivitas *modular parties* sangat bergantung pada perawatan jaringan broker yang intensif dan terarah; sebaliknya, hilangnya suara di wilayah non-prioritas seperti Dalung menjadi indikasi kuat bahwa tanpa intervensi modul kemenangan yang aktif merawat jaringan, dukungan elektoral akan cenderung cair dan sulit untuk dipertahankan.

Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan I Made Suryananda Pramana dalam mempertahankan kursi legislatifnya selama dua periode berturut-turut (2019 dan 2024) merupakan manifestasi nyata dari strategi hibridisasi modal yang dikelola dengan presisi. Temuan penelitian ini mengonfirmasi hipotesis awal bahwa terdapat pergeseran strategi dari pola patronase tradisional menuju mekanisme *modular parties* yang lebih kompleks. Kemenangan ini membuktikan bahwa keberhasilan elektoral di tingkat lokal tidak lagi sekadar bergantung pada kerja institusional mesin partai PDIP semata, melainkan lebih ditentukan oleh kecakapan aktor politik dalam memodularisasi jaringan klientelistik. Dengan memanfaatkan struktur adat dan komunitas lokal (seperti banjar) sebagai "modul-modul" kemenangan yang otonom, kandidat mampu menciptakan infrastruktur politik yang paling adaptif dan efisien. Strategi ini memungkinkan adanya mobilisasi suara yang tangguh di tengah dinamika demokrasi elektoral kontemporer di Bali yang semakin pragmatis. Akhirnya, hibridisasi antara kekuatan modal elit dengan fleksibilitas jaringan modular berbasis sosial-kultural inilah yang menjadi kunci resiliensi politik kandidat dalam menghadapi volatilitas dukungan pemilih.

REFERENSI

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesian politics and society in the Jokowi era. In E. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), *Problems of democratisation in Indonesia: Ethnicity, Islam, and the rise of populism* (pp. 1–25). ISEAS Publishing.

- Boas, T. C., & Hidalgo, F. D. (2019). The political consequences of conditional cash transfers: The role of local political context. *World Development*, 118, 178–190. doi: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.02.007>
- Desmaris, B., & He, J. (2019). The modular party: A new model for electoral organization. *Party Politics*, 25(6), 768–778. doi: <https://doi.org/10.1177/1354068818783478>
- Firman, T. (2019). The politics of urban development in Indonesia: Opportunities and challenges. In E. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), *Problems of democratisation in Indonesia: Ethnicity, Islam, and the rise of populism* (pp. 207–228). ISEAS Publishing.
- Hidalgo, F. D., & Schliemann, P. (2020). The electoral consequences of cash transfers: Evidence from Brazil. *American Journal of Political Science*, 64(2), 269–284. doi: <https://doi.org/10.1111/ajps.12480>
- Ichwan, M. N. (2015). The politics of piety and power: Gender and Islamic revival in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(3), 332–353. doi: <https://doi.org/10.1017/S002246341500045X>
- Kartini, D. (2018). The power of local elites in the Indonesian decentralization era. *Asian Journal of Political Science*, 26(2), 164–180. doi: <https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1485695>
- Lestari, R. (2018). *Peran modal sosial dan politik dalam kemenangan calon legislatif* (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Indonesia.
- Novaes, L. (2020). Modular parties: Electoral organization, clientelism, and the distribution of resources. *Comparative Political Studies*, 53(10), 1656–1687. doi: <https://doi.org/10.1177/0010414919894332>
- Pradipta, D. Y. (2017). Local politics and corruption in Indonesia: The case of a regional head. *Journal of Southeast Asian Economies*, 34(3), 447–468. doi: <https://doi.org/10.1355/ae34-3c>
- Rogers, R. (2010). *Ship registration: A critical analysis*. (Dissertation, World Maritime University, 2010). Retrieved from <https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1446>
- Siswati, E. (2017). Anatomi teori hegemoni antonio gramsci. *Jurnal Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 5(1), 11–33. doi: <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Steans, J., Pettiford, L., Diez, T., & El Anis, I. (2010). *An introduction to international theory: Perspective and themes* (3rd ed.). New York: Routledge.
- Terry, W. C. (2017). Flags of convenience and the global cruise labour market. In R. Dowling & C. Weeden (Eds.), *Cruise ship tourism* (2nd ed.). (pp. 72–85). Oxfordshire: CAB International.
- Uhlin, A. (1988). Transnational corporations as global political actors: A literature review. *Cooperation and Conflict*, XXIII(2), 231–247. doi: <https://doi.org/10.1177/001083678802300208>
- Walker, J. (2009, September 27). *Cruise ship medical care – royal caribbean gives their crew members the royal shaft*. Cruise Law News. Retrieved from <https://www.cruiselawnews.com>